

TESIS

**PROBLEMATIKA PENGUSAHA
DAN PEKERJA/BURUH TERHADAP
UPAH PROSES PASCA PUTUSAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.37/PUU-IX/2011)**



**YUNIARTO WIRYO NUGROHO, SH
NIM : 12108073**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2012**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan anugerahNya, sehingga penulisan tesis saya yang berjudul “Problematika Pengusaha Dan Pekerja/Buruh Terhadap Upah Proses Pasca Putusan Pemutusan Hubungan Kerja” ini dapat saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dimana bahwa penulisan tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ketenagakerjaan yaitu No.37/PUU-IX/2011, membawa implikasi yang sangat berarti bagi dunia usaha, khususnya para pelaku usaha yang ada di Indonesia. Banyak terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran terkait dengan upah proses pasca putusan pemutusan hubungan kerja, sehingga saya tertarik mengangkat topik ini untuk dibahas dalam penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini juga, saya sebagai penulis tidak lupa ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sedalam-dalamnya atas bantuan yang telah diberikan kepada Ibu Tutiek Retnowati, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing saya, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan kesabarannya dalam membimbing dan memberikan pengarahan sehingga penulisan tesis ini dapat selesai. Selain itu, tidak lupa penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada ;

1. Rektor Universitas Narotama Surabaya, Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST., atas segala bantuan, berbagai fasilitas dan kemudahan, serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
2. Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya Ibu Tutiek Retnowati, SH.,M.Hum., beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Hukum dan Seluruh Dosen / Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang dengan ketelatenan dan kesabarannya telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
4. Dosen Pembimbing tesis saya, Ibu Tutiek Retnowati, SH.,M.Hum, yang dengan ketelatenan dan kesabarannya telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta ilmu kepada penulis.
5. Panitia / Tim Dosen Penguji Tesis di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji tesis dari penulis.
6. Seluruh Staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah banyak membantu saya, penulis, selama menempuh perkuliahan.
7. Almamater Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, beserta Civitas Akademikanya.

8. Kedua orang tuaku, Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, SH.,Dip.Ed.,M.Sc, dan almarhumah ibu Dra. Sri Wurjani, yang memberiku dorongan, do'a, kasih sayang serta semangat belajar untuk meraih cita-cita yang setinggi-tingginya.
9. Semua kakakku,Wiryono Teguh W,SH., Ir. Laksita Endah W,MT., (alm)Wuryanto Adi W,SH., Wiranto Arya W,SE.,MM., (alm) Wiryawan HW,SH., Kartika Sari W,S.Si.,M.Si., yang telah memberikan support dan bantuan baik moril maupun materiil serta wejangan untuk menempuh kuliah guna mewujudkan cita-cita setinggi-tingginya.
10. Istriku tercinta, Riyani Ningsih yang dengan setia menemani dan mengingatkan dan memberikan dorongan, do'a, kasih sayang serta semangat belajar untuk segera menyelesaikan kuliah ini.
11. Anakku tersayang, Adriansyah Arya Putra Ramadhan yang memberikan dorongan dan selalu mendo'akan serta semangat belajar untuk segera menyelesaikan kuliah.

Saya menyadari sepenuh hati, bahwa dalam penulisan tesis ini banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu, dengan senang hati pula saya akan menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menambah kesempurnaan tesis ini dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Dan akhirnya, saya berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberi manfaat bagi siapa saja dan bagi perkembangan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan.

Surabaya, 16 Juli 2013

YuniartoWiry Nugroho, SH
NIM. 12108073

RINGKASAN

Problematika dalam ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja/buruh semakin beraneka ragam mulai dari kontrak kerja atau perjanjian kerja, gaji pekerja, pemutusan hubungan kerja, hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut dalam ketenagakerjaan dinamakan perselisihan hubungan industrial.

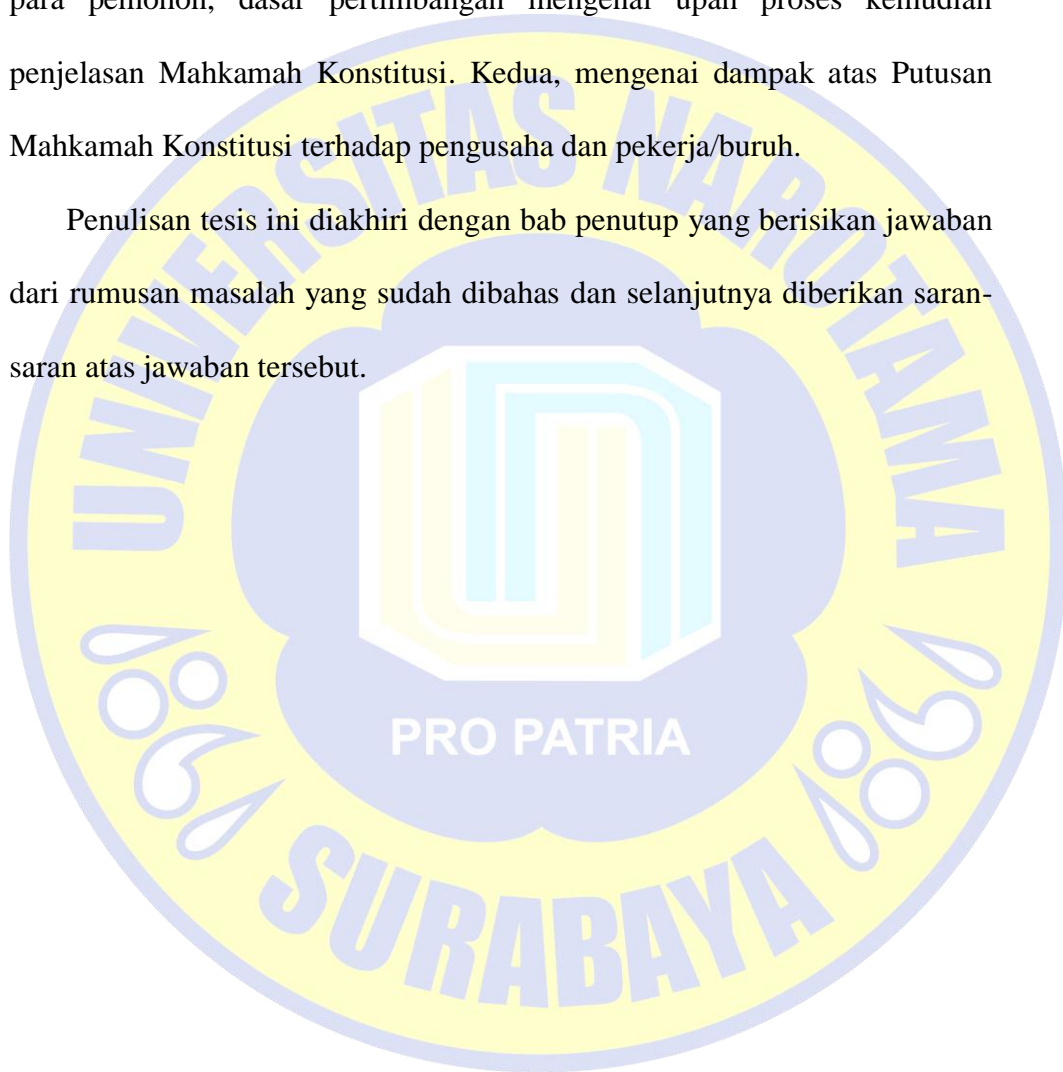
Dalam penulisan tesis ini akan membahas lebih spesifik lagi dari salah satu perselisihan di atas yaitu mengenai upah, lebih jelasnya yang akan dibahas adalah problematika pengusaha dan pekerja/buruh terhadap upah proses pasca putusan pemutusan hubungan kerja.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah pertama, mengenai analisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011. Kedua Dampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 terhadap pengusaha dan pekerja/buruh.

Metode dalam pembahasan masalah ini yaitu dengan pendekatan kasus (case approach) yang ada di masyarakat sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang sebenarnya terjadi yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini dimaksudkan agar apabila terdapat permasalahan yang sama dapat digunakan sebagai yurisprudensi dalam memecahkan atau memutuskan masalah tersebut. Putusan yang berkaitan dengan masalah di atas adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011.

Pembahasan mengenai rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu difokuskan pada, pertama, pembahasan tentang analisa yang dapat diambil dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan dan Hak Konstitusional para pemohon, dasar pertimbangan mengenai upah proses kemudian penjelasan Mahkamah Konstitusi. Kedua, mengenai dampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengusaha dan pekerja/buruh.

Penulisan tesis ini diakhiri dengan bab penutup yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibahas dan selanjutnya diberikan saran-saran atas jawaban tersebut.



ABSTRACT

Employment problems between companies and labours vary from agreement, wage, lay off and rights as well as obligations of labours. These problems are called industrial disputes.

The thesis particularly discusses the wage dispute, that has been a debate between labours and companies after the lay off.

Problems of the study will cover the analysis and impact of Constitution High Court No.37/PUU-IX/2011 toward labours.

The method employed in this study is a case approach aiming at obtaining the facts taken from the field and proved by the court. Thus, this study will serve as jurisprudence if the similar case occurs. The related law court is Constitution High Court No. 37/PUU-IX/2011.

The discussion will focus on the authority of Constitution High Court, the position and constitutional rights of labors, consideration in wage process and Constitution High Court Explanation. In addition, the study will investigate the impact of Constitution High Court towards the labors.

The last chapter of the study will illustrate the analysis of the problems and recommendations.

Key Word : Wage, Lay Off, Rights as well as Obligation, Impact

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Tesis	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Ringkasan	x
Abstrak	xii
Daftar isi	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
3.1. Tujuan Penelitian	6
3.2. Manfaat Penelitian	6
4. Tinjauan Pustaka	7
4.1. Kerangka Teoritis	7
4.1.2. Teori Keadilan	9
4.2. Kerangka Konseptual	15
5. Metode Penelitian	18
5.1. Tipe Penelitian	19
5.2. Pendekatan (<i>Approach</i>)	19
5.2.1. Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	19
5.2.2. Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	19
5.2.3. Kasus (<i>Case Approach</i>)	20
5.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	20
5.3.1. Bahan Hukum Primer	20
5.3.2. Bahan Hukum Sekunder	21

5.3.3. Pengumpulan Bahan Hukum	21
5.3.4. Analisa Bahan Hukum	21
6. Sistematika Penulisan	21

BAB II ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 37/PUU-IX/2011

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	23
1.1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.24 Tahun 2003	23
2. Kedudukan dan Hak Konstitusional Para Pemohon	26
3. Ulasan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	27
4. Dasar Pertimbangan Mengenai Upah Proses	32
4.1. Upah Proses Ditinjau Dari Undang – Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Dasar 1945	32
4.2. Upah Proses Ditinjau Dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 Tahun 2000	38
5. Penjelasan Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	42
5.1. Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	45
5.1.1. Bipartit	49
5.1.2. Mediasi	52
5.1.3. Konsiliasi	56
5.1.4. Lembaga Arbitrase	60

**BAB III DAMPAK BAGI PENGUSAHA DAN PEKERJA/BURUH
ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 37/PUU-
IX/2011**

1. Dampak Bagi Pengusaha Atas Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 67
2. Dampak Bagi Pekerja/buruh Atas Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 78

BAB IV PENUTUP

- Kesimpulan 87
- Saran 88
- Daftar Pustaka
- Lampiran
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 Tahun 2000

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 adalah Mahkamah Konstitusi sebelum mengeluarkan suatu putusan sudah melalui tahap yang panjang dengan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang yaitu dari sisi kewenangan, Sesuai pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pengujian terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 khususnya pasal 155 ayat (2) pada frase "*belum ditetapkan*". Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengenai frase "*belum ditetapkan*" dalam pasal 155 ayat 2 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap artinya bahwa selama putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap para pihak dalam hubungan industrial (baik itu pengusaha maupun pekerja/buruh) harus tetap melaksanakan kewajiban serta di sisi lain para pihak juga harus tetap memperoleh hak-haknya selama masih berperkara dan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Dampak bagi pengusaha dan pekerja/buruh atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 adalah yang **pertama**, bagi pengusaha, pengusaha merasa keberatan karena akan menjadi beban baik dari segi biaya maupun waktu. Dari segi biaya jelas pengusaha sangat dirugikan karena harus membayar upah pekerja/buruh untuk jangka waktu yang panjang yakni sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dari segi waktu pengusaha dirugikan karena proses hukum yang cukup lama yang

mengakibatkan proses penyelesaian perselisihan berlarut-larut sehingga berkontribusi pada pembayaran upah pekerja/buruh. **Kedua**, bagi Pekerja/buruh, dampak bagi pekerja/buruh adalah selama proses putusan berkekuatan hukum tetap, pekerja/buruh mempunyai hak dan kewajiban yang dijanjikan dalam perjanjian kerja. Dampak lain bagi pekerja adalah apabila pengusaha memberikan skorsing pada pekerja/buruh dengan tetap diberikan upah, hal ini yang mengakibatkan dilema bagi pekerja/buruh dikarenakan pekerja/buruh hanya menerima upah dengan tanpa melakukan pekerjaan apapun sedangkan untuk melakukan pekerjaan atau mencari pekerjaan diluar tempat bekerjanya dikhawatirkan akan berpengaruh pada proses putusan berkekuatan hukum tetap yang sedang ditunggu putusan tersebut.

B. Saran

Selanjutnya penulis memberikan beberapa rekomendasi saran yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan, yaitu :

1. Putusan berkekuatan hukum tetap seyogyanya tidak selalu diartikan hanya sampai putusan pengadilan pada tingkat pertama. Bahwa pada putusan tingkat pertama masih ada upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh oleh pihak penerima putusan. Bilamana upaya hukum tersebut tidak dipergunakan atau tidak ditempuh selama batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang berarti dinyatakan menerima putusan pengadilan pada tingkat pertama dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi apabila dipergunakan upaya hukum itu sampai dengan upaya hukum terakhir berarti putusan berkekuatan hukum tetap terdapat pada upaya hukum terakhir. Dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Dengan banyaknya kasus yang menumpuk dan harus segera diputuskan oleh Mahkamah Agung serta harus

segera dikirimkan pula salinan putusan kepada para pihak maka sebaiknya para pihak tetap menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.

2. A. Selama proses putusan berkekuatan hukum tetap seyogyanya para pihak dalam hubungan industrial (pengusaha maupun pekerja/buruh) tetap melaksanakan kewajiban serta disisi lain para pihak juga harus tetap memperoleh hak-haknya selama masih berperkara dan menunggu putusan erkekuatan hukum tetap.
- B. Bagi pengusaha agar terhindar dari resiko hukum sebaiknya melibatkan ahli hukum yang berkompeten (lawyer, legal consultant) dalam proses perancangan kontrak atau perjanjian kerja.
- C. Bagi Pekerja/buruh selama merasa tidak dirugikan seyogyanya tidak melakukan hal-hal lain atau dalam tindakan sendiri diluar hak dan kewajibannya. Hal ini dikhawatirkan berpengaruh di kemudian hari pada sebelum atau sesudah dikeluarkannya putusan berkekuatan hulum tetap. Pekerja/buruh sebaiknya perlu melibatkan ahli hukum yang berkompeten (Lawyer, lagal consultant) dalam hal ingin mengetahui tentang hukum dan proses hukum.
- D. Dalam hal keberatan pengusaha atas jangka waktu pembayaran upah bagi pekerja/buruh mengenai penantian keputusan tetap pemutusan hubungan kerja, pengusaha dapat menyiasatinya yaitu pada waktu diterbitkan surat skorsing bagi pekerja, pengusaha dapat membuat perjanjian dengan pekerja yang isinya mengenai ketentuan pembayaran upah. Yang dimaksudkan disini adalah pembayaran upah akan terus dibayarkan dengan syarat-syarat tertentu, misalnya adanya larangan bagi pekerja untuk bekerja ditempat lain, penetapan penghitungan hak-hak lain, misalnya uang pesangon, uang penghargaan dan lain-lain. Perjanjian disini dimaksudkan agar ada penekanan terhadap pekerja/buruh dan membatasi ruang gerak pekerja/buruh apabila dikemudian hari terjadi hal-hal

yang tidak diinginkan. Perjanjian ini juga diharapkan tidak merugikan/menguntungkan salah satu pihak, baik dari pengusaha maupun pekerja/buruh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Asyhadie Zaeni, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Ed.1, Cet.8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Asikin H. Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Ed.1, Cet.8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ali, M, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, 2006.
- Damanik, Sehat, *Hukum Acara Perburuhan*, Cetakan I, Dss Publishing, 2005.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Ed 2 - 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.
- FX Djumialdi, *Perjanjian Kerja*, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed.1, Cet.2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Husni, Lalu, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Ed.1, Cet.8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed.3, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Khakim, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed.3, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Manulang, Sendjun H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.1, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Naning, Ramdlon, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, Cet.1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Pangaribuan, Juanda, *Tinjauan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Ed.Revisi, Bumi Initama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Soepomo, Iman, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Cet.9, Djambatan, Jakarta, 2001.

Soepomo, Iman, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Cet.1, Djambatan, Jakarta, 1975.

Periksa Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan bagian pertama Hubungan kerja*, PPKRI Bhayangkara, Jakarta, 1968.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.3, Rajawali, Jakarta, 1990.

Supomo, R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet 10, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Triwulan Tutik, Titik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Cet.1, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.

Wahab, H.Agusfian, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Ed.1, Cet.8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Ed.1, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ed 1, Cet 3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Yudha Hernoko, Agus, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Ed. 1, Cet. 1, LaksBang Mediatama Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.

Peraturan Perundang - undangan

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Nuansa Aulia, Bandung, 2005.

Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Citra Umbara, Bandung, 2003.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, *Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, unduh internet tgl 22 mei 2012, h.24

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000, *Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Di Perusahaan*

Referensi Lain

Catatan Kuliah Magister Ilmu Hukum, Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan, Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, 15 Oktober 2011.

Souhoka, Marten L, Hand Out Materi Perkuliahan Magister Ilmu Hukum, Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan, 2011.

Joglosemar, Surat Kabar Harian Solo, Abaikan UMR, Pengusaha Dipenjara, Kamis 25 April 25April 2013.

